BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kapabilitas/Kemampuan

Kapabilitas menurut (Amir, 2011:86) menjelaskan bahwa :

> "Kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Ibarat individu, belum tentu seorang yang memiliki bakat, misalnya pemain piano bisa bermain piano dengan baik. Ini sangat ditentukan dengan bagaimana ia mengembangkannya dengan latihan, dan belajar".

Kapablitas menurut (Robbins, 2004:218) Menjelaskan bahwa:

> "Tingkat kerja pegawai akan sangat tergantung pada faktor kemampuan pegawai itu sendiri seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman dimana dengan tingkat kemampuan yang semakin tinggi akan mempunyai kinerja semakin tinggi pula. Dengan demikian tingkat pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang rendah akan berdampak negatif pada kinerja pegawai".

Kapabilitas menurut (Moenir, 2003:76) Menjelaskan bahwa:

> "Yang dimaksud dengan kemampuan dalam hubungan dengan pekerjaan adalah suatu keadaan pada seseorang yang secara penuh kesungguhan, berdayaguna dan berhasil guna melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Dalam kemampuan terdapat tiga unsur, yaitu:
>
> 1. Unsur kecakapan
> 2. Unsur fisik
> 3. Unsur mental
>
> agar unsur ini saling menunjang maka ketiganya dalam gabungan secara serasi menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan persyaratan kerja".

Menurut (Robbins, 2007:57) Kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya terdiri atas dua kelompok faktor yaitu:

1. Kemampuan intelektual.
2. Kemampuan fisik.

Berikut adalah Penjelasan dari dua kelompok faktor Kemampuan :

1. Kemampuan intelektual

   Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental- berpikir, menalar dan memecahkan masalah. Individu dalam sebagian besar masyarakat menempatkan kecerdasan sebagai tolak ukur dan kecerdasan itu dilihat dari tingkat pendidikan yang semakin tinggi.

2. Kemampuan fisik

   Kemampuan fisik adalah kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan dan karakteristik serupa.

Menurut (Robert, 2006:114), Kapabilitas/Kemampuan adalah :

"Kemampuan individual dipengaruhi oleh bakat, minat dan faktor kepribadian orang tersebut. Bakat dan minat tersebut pada umumnya diasah dalam pendidikan formal sehari-hari di dalam masyarakat. Sehingga dapat digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Pada umumnya kemampuan individu diperlihatkan dalam kecerdasan intelektual dn pendidikan".

2.1.1. Jenis-Jenis Kapabilitas/ Kemampuan.

Ada 3 jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk mendukung seseorang dalam melakukan pekerjaan atau tugas, sehingga tercapai hasil yang maksimal.(Moenir, 2008:117), yaitu :

1. *Technical Skill* (Kemampuan Teknis).
2. *Human Skill* (Kemampuan bersifat manusiawi).
3. *Conceptual Skill* (Kemampuan Konseptual).

Berikut adalah Penjelasan dari jenis-jenis Kemampuan/ Kapabilitas :

1. *Technical Skill* (Kemampuan Teknis) Adalah pengetahuan dan penguasaan kegiatan yang bersangkutan dengan cara proses dan prosedur yang menyangkut pekerjaan dan alat-alat kerja.

   Menurut pengertian diatas, kemampuan teknis yang dimaksud adalah seseorang pegawai di dalam organisasi harus mampu dalam penguasaan terhadap metode kerja yang ada. Artinya, bahwa Badan Pendapatanan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dituntut melakukan pendidikan berkelanjutan. Tujuan dari pendidikan berkelanjutan adalah mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan.

2. *Human Skill* (Kemampuan bersifat manusiawi) Adalah kemampuan untuk bekerja dalam kelompok suasana di mana organisasi merasa aman dan bebas untuk menyampaikan masalah.

   Kecakapan bersifat manusiawi disini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dalam bekerja dengan team work atau kelompok kerja, yakni dalam bekerja sama dengan sesama anggota organisasi. Hal ini penting sekali karena jika menutup diri maka tidak akan mencapai hasil kerja yang maksimal. Jadi kemampuan dalam berkomunikasi mengeluarkan ide, pendapat bahkan di dalam penerimaan pendapat maupun saran dari orang lain dapat menjadi faktor keberhasilan melaksanakan tugas yang baik.

3. *Conceptual Skill* (Kemampuan Konseptual) Adalah kemampuan untuk melihat gambar kasar untuk mengenali adanya unsur penting dalam situasi memahami di antara unsur-unsur itu.

   Kemampuan yang ketiga adalah kemampuan konseptual, kemampuan disini bagaiman seorang pegawai apabila sebagai decision maker dalam menganalisis dan merumuskan tugas-tugas yang diembannya. Dengan kemampuan konseptual ini, maka pekerjaan dapat terarah dan berjalan dengan baik karena dapat memilih prioritas-prioritas pekerjaan mana yang harus didahuluankan dan sebelum bekerja cenderung menggunakan skala prioritas.

2.1.2. Indikator Kapabilitas / Kemampuan.

Menurut (Dharma, 1995:5-6), mengatakan: “Kemampuan kerja merupakan suatu keadaan yang ada pada diri pekerja yang secara sungguh-sungguh berdayaguna dan berhasil dalam bekerja sesuai bidang pekerjaannya”.

Dalam pembentukannya, kemampuan kerja mengacu kepada beberapa indikator, menurut Hersey dan Blanchard antara lain sebagai berikut:

1. Kemampuan teknis
    - Penguasaan terhadap peralatan kerja
    - Penguasaan terhadap prosedur dan metode kerja
    - Memahami peraturan tugas atau pekerjaan
2. Kemampuan Bersifat manusiawi/sosial
    - Mampu berkerjasama dengan rekan
    - Mampu berkerja dengan tim
    - Mampu berempati
3. Kemampuan Konseptual
    - Memahami kebijakan instansi
    - Memahami tujuan instansi
    - Memahami target instansi

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan pegawai adalah salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan kemampuan teknis, kemampuan sosial, kemampuan konseptual.

2.2. Pengertian Sumber Daya Manusia

Menurut (Rudolf, 2002:89) mendefinisikan Sumber Daya Manusia sebagai:

> "Satu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai".

Menurut (Susilo, 2003:3) mendefinisikan sumber daya manusia sebagai berikut:

> "Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya".

Menurut (Ihsanti, 2014) mendefinisikan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah:

> "Kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien".

Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan agar mampu menerapkan sistem akuntansi yang ada. Kegagalan sumber daya manusia

pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yangditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

2.3. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris yaitu *accountability*,yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan yang diminta pertanggungjawaban (Salim, 1991:33). Pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sangatlah diperlukan karena organisasi pemerintah pada dasarnya adalah suatu lembaga yang berorientasi kepada publik atau masyarakat dan hasil laporan dari organisasi pemerinth tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Menurut (Lembaga Administrasi Negara, 2003:3) definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

> "Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau, menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan, hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban".

Menurut (Sedarmayanti, 2003:3) pengertian akuntabilitas sebagai berikut:

> "Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik".

Menurut (Mardiasmo, 2004:20) definisi akuntabilitas sebagai berikut:

> "Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut".

Berdasarkan beberapa definisi akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*agent*) kepada masyarakat sebagai pemberi amanah (*principal*) untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian,pelaporan,pengungkapan (*disclosure*) segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Pemerintah bertindak sebagai pelaku (*subyek*) pemberi informasi untuk memenihi hal-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

2.3.1. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2006:21) secara umum Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*).
2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*).

Kedua macam akuntabilitas tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Akuntabilitas vertikal (*vertical Accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (badan) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan Akuntabilitas Horisontal *(Horizontal Accountability)* adalah

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks Organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberi informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah pusat dan daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Sedangkan menurut (Rosjidi, 2001:144) Akuntabilitas menjadi dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Internal
2. Akuntabilitas Eksternal

Berikut adalah Penjelasan dari macam-macam Akuntabilitas :

1. Akuntabilitas Internal

   Akuntabilitas internal berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintahan Negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk memperanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatan secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Akuntabilitas Eksternal

   Sedangkan akuntabilitas eksternal melekat pada setiap Lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

2.3.2. Sifat Akuntabilitas

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaanya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi. (Ellwood, 1993:368) menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintah dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrasi
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat, dan efektivitas.

Akuntabilitas juga dapat dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif *(legal comliance)* ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. *Probility and legality accountability*
2. *Process accountability*
3. *Performance accountability*
4. *Program accountability*
5. *Policy accountability*

Berikut adalah Penjelasan dari tahap Akuntabilitas :

1. *Probility and legality accountability*

   hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *(compliance).*

2. *Process accountability*

   dalam hal ini digunakan proses, prosedure, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan *(planning, allocating and managing).*

3. *Performance accountability*

   pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economic*).

4. *Program accountability*

   disini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut *(outcomes and effectiveness*).

5. *Policy accountability*

   dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

2.3.3. Ciri-ciri Pemerintahan yang Akuntabel

Menurut (Widodo, 2010:104) menjelaskan:

> "Akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokarsi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras".

Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* atau tindakan sebuah birokrasi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* atau tidaknya sebuah birokrasi. Terdapat beberapa ciri pemerintahan yang *accountable* di antaranya sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja *(performance)* pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

2.3.4 Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut adalah antara lain (Ellwood, 1993:371):

1. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran (*accountability for probility and legality*).
2. Akuntabilitas Proses (*Process accountability*).
3. Akuntabilitas program (*Program accountability*).
4. Akuntabilitas kebijakan (*Policy accountability*).

Berikut adalah Penjelasan dari dimensi Akuntabilitas:

1. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran (*accountability for probility and legality*).

   Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga - lembaga publik untuk berprilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisas. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas Proses (*Process accountability*)

   Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif dan biaya murah.

3. Akuntabilitas program (*Program accountability*).

   Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lebaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas kebijakan (*Policy accountability*)

   Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan.

2.3.5 Indikator Akuntabilitas.

Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan di atas yang bersumber dari (Ellwood, 1993:374) dimensi tersebut dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. **Akuntabilitas hukum dan kejujuran**
    a. Kepatuhan terhadap hukum
    b. Penghindaran korupsi dan kolusi
2. **Akuntabilitas proses**
    a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
    b. Adanya pelayanan publik yang responsif.
    c. Adanya pelayanan publik yang cermat.
    d. Adanya pelayanan publik biaya murah.
3. **Akuntabilitas program**
    a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
    b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.
4. **Akuntabilitas kebijakan**.
    a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

2.4 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut (Sofiyan, 2002: 7) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan:

> "Pokok atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan juga menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuan".

Menurut (Munawir, 2004: 2) laporan keuangan adalah:

> "Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut".

Menurut, (Standar Akuntansi Keuangan, 2009: 2) nmenjelaskan bahwa:

> "Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan atas laporan keuangan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan".

Menurut (Mardiasmo, 2009: 159) laporan keuangan organisasi sektor publik adalah:

> "Komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan".

Pengertian laporan keuangan pemerintah atau sektor publik menurut (Indra, 2010:297) adalah "representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik". Definisi laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 mengemukakan laporan keuangan pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkaitan dan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

Menurut (Mardiasmo, 2009), tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*).
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*).
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*).
4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*).
5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*).
6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*).

Berikut adalah Penjelasan dari tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*).

   Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otorisasi penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*).

   Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*).

   Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang.

4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*).

   Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*).

   Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*).

   Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa tujuan umum dari laporan keuangan adalah:

> "Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya".

Menurut (Indra, 2010 :297) tujuan umum pelaporan keuangan adalah:

> "Tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan".

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut PP 71 Tahun 2010 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintahan.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintahan.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintahan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut (Mardiasmo, 2009) para pengguna informasi laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas.

4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan Negara.
5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

2.4.1. Komponen Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 komponen laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disertai dengan Pernyataan Telah Di review yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Berikut adalah Penjelasan dari komponen laporan keuangan :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan

2. Neraca

   laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

   merupakan penjelasan narativ atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

2.4.2. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010, Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan.
2. Andal.
3. Dapat dibandungkan.
4. Dapt difahami.

Berikut adalah Penjelasan darikarakteristik Laporan Keuangan ::

1. **Relevan.**

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan. Informasi yang relevan menurut PP No. 71 Tahun 2010, yaitu:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).

   Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).

   Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu.

   Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap.

   Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2. Andal.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

a. Penyajian jujur.

   Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan secara wajar.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*).

   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas.

   Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan

secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. **Dapat dipahami.**

   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkaitan dan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, dengan karakteristik:

1. Relevan
   a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*);
   b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*);
   c. Tepat waktu;
   d. Lengkap.

2. Andal
   a. Penyajian jujur;
   b. Dapat diverifikasi;
   c. Netral.

3. Dapat dibandingkan
   a. Konsistensi;
   b. Dapat dibandingkan.

4. Dapat dipahami
   a. Dinyatakan dengan batas pemahaman para pengguna.

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Zulfikar M Fikrie S (2014)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Laporan Keuangan Daerah	Variabel Independen: X_1: Transparansi X_2: Akuntabilitas Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Transparansi dan Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan.
Andika Fransiska Ritonga (2015)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Variabel Independen: X_1: Kompetensi Sumber Daya Manusia X_2: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Analisis Regresi Linier Berganda	Secara simultan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Sekar Endah Puspa Ningrum (2015)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: X_1: Kompetensi Sumber Daya Manusia X_2: Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Analisis Regresi Linier Berganda	Terdapat pengaruh signifikan Kompetensi sumber daya manusia dan Pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.5. Kerangka Pemikiran

2.5.1. Pengaruh Kapabilitas Sumber Daya manusia dan Akuntabilitas terhadap Laporan keuangan

a. Hubungan Kapabilitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan.

Menurut (Rahayu dkk, 2014:34) kemampuan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting didalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh penggguna informasi laporan keuangan.

Kapabilitas/ kemampuan sumber daya manusia menurut (Robbins, 2006:52) diartikan sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya.

Pada penelitian (Nazier,2009) latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Sumber daya manusia yang berlatar belakang

pendidikan akuntansi atau setidaknya memiliki pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Namun akhir-akhir ini terdapat permasalahan terkait latar belakang pendidikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Masalah-masalah tersebut adalah belum dimilikinya atau kurangnya sumber daya manusia berlatar pendidikan akuntansi, belum ada kebijakan rekruitmen pegawai berlatar belakang akuntansi, dan adanya anggapan bahwa sumber daya manusia yang bukan berlatar belakang akuntansi mampu melaksanakan tugas dengan modal pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bimbingan.

Sumber daya manusia adalah salah satu elemen yang penting dalam organisasi. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi akan menentukan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Penelitian (Andriani, 2010) memberikan bukti bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja Dengan demikian, pemahaman, skill, dan kemampuan pegawai bisa mempengaruhi kualiatas dari laporan yang akan mereka susun.

Bukti adanya pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan juga dikemukakan oleh (Rahmayati, 2012) yang mengemukakan bahwa penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikannya, yaitu pegawai yang berlatar belakang pendidikan ekonomi akuntansi sebagai staf penyusun laporan keuangan akan menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Kualitas sebuah Laporan Keuangan

merupakan gabungan dari kualitas bagian-bagian dari Laporan Keuangan tersebut, salah satunya adalah kualitas dari Neraca dalam Laporan Keuangan. Laporan Barang Kuasa Pengguna memberikan sumbangan informasi yang signifikan dalam neraca Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Barang Kuasa Pengguna akan mempengaruhi juga kualitas Neraca Laporan Keuangan, yang berarti juga akan mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan itu sendiri. Berdasarkan konsep dan bukti empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis 1 yang diajukan adalah :

H1 : Kapabilitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kapabilitas sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah.

b. Hubungan Akuntabilitas dan Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan (Lembaga Administrasi Negara, 2003:3) Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan atau hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban.

(Mardiasmo, 2004:20) menyatakan Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan

yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan (audit)/ respon pemerintah.

Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara Akuntabilitas dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah.

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan keuangan.

c. Hubungan Kapabilitas Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas dan Kualitas Laporan Keuangan.

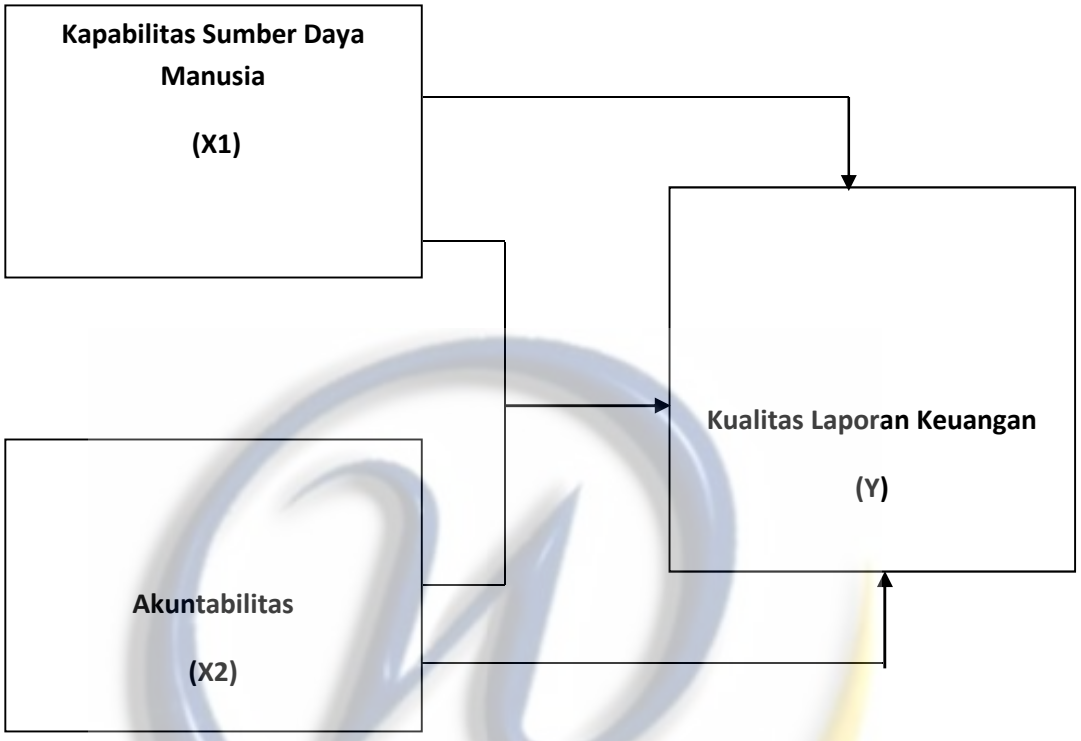
Kualitas laporan keuangan akan tercapai dengan dipengaruhi oleh kapabilitas sumber daya manusia yang memiliki pemahaman akuntansi dan penerapan Akuntabilitas yang juga turut diimplementasikan oleh manusia.

Penjelasan mengenai pengaruh kapabilitas sumber daya manusia dan Akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat secara singkat melalui kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran berupa gambar skema untuk lebih menjelaskan hubungan antara variable independen dan variable dependen.

H3 : kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap laporan keuangan.

Gambar 2.2 adalah kerangka pemikiran dari penelitian mengenai pengaruh kapabilitas sumber daya manusia dan penerapan Akuntabilitas pemerintah terhadap kualitas laporan keuagan.

Variable Independen **Variable Dependen**



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.5.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan variable X sebagai variabel Independen dan variabel Y sebagai variabel Dependen maka dapat ditarik hipotesis sebagi berikut :

H_1 : Kapabilitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan .

H_2 : Penerapan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan .

H_3 : Kapabilitas sumber daya manusia dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan .